



**DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA**

**PRESS CABLE**

**NOMOR : 007/13012009**  
**HARI : SELASA**  
**TANGGAL : 13 JANUARI 2009**

**DAFTAR ISI**

		<b>Halaman</b>
<b>I.</b>	<b>INTERNASIONAL</b>	
	ICG: Indonesia can play positive role in Gaza	3
	Ocean Conference: RI must take sterner action against illegal fishing nations	3
	RI, France unhappy with UN resolution rejection	4
	Yudhoyono kontak Sarkozy soal Palestina	4
	RI siap jadi tuan rumah bahas krisis Jalur Gaza	4
	RI-Suriah Minta Resolusi Lebih Keras	5
	Militer RI-Australia Sepakati Perjanjian Lombok	6
	Tenaga Kerja Indonesia yang Tejebak di Palestina Sudah Aman	7
<b>II.</b>	<b>NASIONAL</b>	
	<b>A. POLITIK</b>	
	Presiden Akan Beri Pengarahan Soal APBN	8
	Legiun Veteran Desak Amandemen UUD	8
	KPU Akan Cabut Usulan Perpres	8
	<b>B. EKONOMI</b>	
	Menhub : "Aneh" Jika Pilot dan Pelaut Tak Punya NPWP	9
	Price cuts: Yudhoyono's generous gift ahead of polls	10
	<b>C. SOSBUD</b>	

		Tahun 2009, Harga Obat Dijamin Stabil	10
		Program Konseling bagi Narapidana KDRT Disiapkan	11
	<b>D.</b>	<b>HANKAM</b>	
		TNI AL Kirim Kapal Perang ke Lebanon	11
		TNI Minta Tambah Anggaran	12
	<b>E.</b>	<b>HUKUM</b>	
		KBRI Singapura Diminta Lacak Hartono	12
	<b>F.</b>	<b>OLAHRAGA: Tidak Ada</b>	
	<b>G.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
		Bank Inggris Komitmen Beli Karbon Hutan Aceh	13
	<b>III.</b>	<b>ARTIKEL</b>	
		Tantangan Baru, Problem Lama oleh Bambang Soesatyo	14
		Korupsi KPK Bidik Penyelewengan Pelayanan Publik oleh Antasari Azhar	15
	<b>IV.</b>	<b>LAIN-LAIN: Tidak Ada</b>	
	<b>V.</b>	<b>EDITORIAL</b>	
		Stopping financial predators	17
		Golput Administratif yang Mengkhawatirkan	18

**Jakarta, 13 Januari 2009**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**

## **I. INTERNASIONAL :**

### **1. ICG: Indonesia can play positive role in Gaza**

International Crisis Group (ICG) President Gareth Evans opined that Indonesia could play a positive role in efforts to solve the Gaza crisis following Israeli air raids on Gaza Strip in Palestinian area since December 27, 2008.

The Australian former foreign minister made the statement in a seminar on "The Middle East and the World: The State of International Security 2009" here on Monday.

Commenting on Indonesian role, Evans said the country would probably provide peace-keeping force, although it was not easy to be accepted.

"I haven't heard a speculation about it but I think Indonesia can play its positive role in Gaza," Evans said.

He added that Indonesia had played its active diplomatic role to end Gaza crisis through a dialog between President Susilo Bambang Yudhoyono and his French counterpart Nicolas Sarkozy, and an active diplomacy with the UN Security Council and other international organizations.

Evans said that a call for an immediate cease-fire in Gaza was necessary because the situation there should not be even worse.

He asserted that to support a cease-fire in Gaza, the factions in Palestine should be united, although it was not easy.

Evans added that the international community should realize that the cease-fire has to be supported by both Fatah and Hamas groups. (Antara)

### **2. Ocean Conference: RI must take sterner action against illegal fishing nations**

The Indonesian government must use the momentum it gained through hosting the World Ocean Conference (WOC) in May to force foreign countries to stop illegal fishing in its waters, an activist says.

"The government must show courage and demand foreign countries take responsibility for allowing illegal fishing in Indonesia and ask them to stop it," Fisheries Justice Coalition (Kiara) secretary-general Riza Damanik said Monday.

About 10,000 delegates from 140 countries, including ministers, are expected to attend the ocean conference, to be held in the North Sulawesi capital of Manado from May 11 to May 15.

Kiara criticized the government for failing to involve local fisheries communities in drafting the agenda for the conference.

"The conference should benefit fisheries communities in Indonesia, otherwise we will constitute nothing more than a good event organizer," Riza said.

He said illegal poaching, compounded by high-production costs due to the fuel price hike last year, had significantly decreased local fishermen's income.

"Fishermen in Jakarta Bay, for example, had their income cut by 60 percent last year," he said. The conference aims to address the impacts of climate change on oceans and the degradation of marine wildlife.

The world's total ocean surface absorbs about 90 billion tons of carbon from and releases 92 billion tons of carbon into the atmosphere every year.

Oceans are 50 times more carbon absorbent than the atmosphere. Mangroves are known to protect shorelines from coastal erosion.

Heads of states of Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, the Philippines, the Solomon Islands and Timor Leste will attend the conference.

The six countries will launch the Coral Triangle Initiative, which is aimed at retarding the degradation of coral and safeguarding vulnerable species from the impact of global warming.

The 5.7 million square-kilo eter triangle is the global center of marine biodiversity with more than 600 coral species and 3,000 fish species, many of which are endemic. (The Jakarta Post)

### **3. RI, France unhappy with UN resolution rejection**

President Susilo Bambang Yudhoyono says Indonesia and France are "very disappointed" about the continuation of violence in the Gaza Strip despite a recent UN resolution calling for the halt of Israeli attacks against Hamas targets in the area.

After speaking on the phone with France President Nicolas Sarkozy on Saturday, Yudhoyono told a press briefing he and Sarkozy shared the same concerns about the attacks, which continued to claim the lives of innocents.

"We know that the resolution has not been obeyed in the field. Violence still continues, with fatalities mounting. The humanitarian crisis is ongoing there, claiming more women and children," he said.

He said Indonesia's stance was clear: Israel must withdraw its troops from Gaza and end its attacks immediately. Yudhoyono said he had told Sarkozy it was urgent that the international community launch efforts to ensure the resolution was obeyed by both sides.

He said that if the UN resolution did not stop Israeli attacks and force both sides to agree to a cease-fire, then a clear mechanism should be enforced to assert the resolution.

"Indonesia will seek other action to push for compliance. But if the attacks continue then there should be a new resolution or at least a mechanism that can be agreed to by both sides," Yudhoyono said.

The President said he and Sarkozy had agreed that communication among world leaders should be intensified so that all voices were heard on how to solve the Gaza crisis. (The Jakarta Post)

### **4. Yudhoyono kontak Sarkozy soal Palestina**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono besok akan menelepon Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyusul keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait serangan militer Israel ke Jalur Gaza.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal mengatakan Sarkozy baru saja mengadakan kunjungan ke sejumlah negara di Timur Tengah untuk mencari solusi bagi konflik Palestina.

"Kedua Kepala Negara optimistis akan adanya penyelesaian yang baik bagi Palestina dan Israel," ujar Dino dalam jumpa pers hari ini.

Dia mengungkapkan Presiden Yudhoyono menyambut baik Resolusi Dewan keamanan PBB terkait konflik antara Palestina dan Israel itu. Presiden sejak awal mendorong dikeluarkannya resolusi.

"Beliau menulis surat kepada Sekjen PBB Ban Ki Moon. Indonesia mengatakan perlunya dikeluarkan resolusi karena serangan darat dan udara terus berlanjut," katanya.

Dino mengungkapkan isi resolusi antara lain mencakup gencatan senjata, mengutuk kekerasan dan permusuhan yang ditujukan kepada penduduk sipil, rekonsiliasi, upaya mendukung mediasi oleh Mesir dan Liga Arab, serta pembentukan dua negara demokratis Israel dan Palestina.

Indonesia, lanjutnya, juga menginginkan pentingnya pasukan pengawas internasional untuk memastikan agar proses gencatan senjata berjalan dengan baik. Indonesia bersedia untuk mengirimkan pasukan setelah konsep mengenai pasukan pengawas tersebut selesai disusun PBB.

Presiden, lanjut Dino, juga akan menerima kunjungan kenegaraan PM Suriah Muhammad Naji Otri pada Senin pekan depan.

"Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Suriah adalah pemain penting di Timur Tengah. Pertemuan juga membahas perkembangan terakhir dan upaya mencari solusi dari kekerasan yang sekarang pecah di Palestina. (Bisnis Indonesia)

## **5. RI siap jadi tuan rumah bahas krisis Jalur Gaza**

Wapres Jusuf Kalla mengatakan Indonesia bersedia menjadi tuan rumah pertemuan darurat negara-negara Islam untuk mencari solusi atas krisis yang terjadi di Jalur Gaza Palestina di samping mengirim pasukan penjaga perdamaian.

Hal itu dikemukakan Wapres saat menerima kunjungan PM Suriah Muhammad Naji al-Otari di kantornya, hari ini. Dalam pertemuan itu Wapres didampingi Menteri Agama Maftuh Basyuni dan Deputi Wapres bidang Kesra Azumardi Azra. "Indonesia sangat siap untuk itu [pertemuan darurat]. Indonesia siap untuk menjadi host kapan saja dilaksanakan karena Indonesia sangat mendukung," ujar Kalla.

Menurut dia, rakyat dan pemerintah sangat mendukung secara moril perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan haknya. Namun, dia tidak menjelaskan apakah sudah ada pendekatan dari pihak Timur Tengah agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Penyelesaian krisis Palestina dan Israel tidak mudah. Kalla menambahkan penolakan Israel atas resolusi yang dikeluarkan PBB untuk menghentikan serangan, bukanlah untuk pertama kali. Penolakan itu sudah sering dilakukan kendati mendapat tekanan internasional.

Menurut Kalla, saat ini diperlukan persatuan Liga Arab untuk membantu penyelesaian krisis tersebut di samping persatuan faksi-faksi yang ada di Palestina itu sendiri. Begitu juga dengan negara-negara Islam secara keseluruhan. "Indonesia sudah puluhan tahun mendukung demonstrasi, berdoa, tetapi tanpa persatuan di kalangan Palestina sendiri tidak mungkin dicapai," ujar Kalla.

Terkait dengan pengiriman pasukan penjaga perdamaian, Kalla menyebutkan Indonesia siap untuk mengirim pasukan tersebut selama ada resolusi PBB untuk itu. "Kalau ada resolusi PBB tentu Indonesia siap, yang pertama apalagi tentara Indonesia ada di Lebanon. Karena dengan mudah untuk menambah pasukan Indonesia di situ," katanya. (Bisnis Indonesia)

## **6. RI-Suriah Minta Resolusi Lebih Keras**

Pemerintah Indonesia dan Suriah sepakat mendorong Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi lebih keras menanggapi ketidakpatuhan Israel atas Resolusi 1860 untuk melakukan gencatan senjata.

Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Suriah Muhammad Naji Otri dalam keterangan pers bersama se usai mengikuti pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/1).

"Jika memang Israel tidak bisa mematuhi, hendaknya Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan resolusi yang lebih keras lagi yang secara hukum bisa mengikat Israel untuk segera menghentikan aksi kekerasannya di Palestina dilanjutkan dengan gencatan senjata," kata SBY.

Perdana Menteri Suriah mendukung usul SBY tersebut. "Saya sepenuhnya mendukung rencana Presiden SBY tersebut dan kita berharap Israel bisa menghormati resolusi PBB," ujar Otri. Di mata Suriah, kata Otri, Israel tidak lebih dari sebuah negara teroris yang telah berkali-kali melanggar berbagai perjanjian perdamaianya dengan Palestina. Otri mengajak seluruh negara muslim di dunia bekerja sama mendorong negara-negara lainnya untuk menghentikan aksi keji Israel.

"Israel bukan hanya melakukan aksi keji di Palestina, tetapi mereka juga berencana untuk menghancurkan Masjid Aqsa yang penting bagi kaum muslim, hanya dengan alasan ingin mengambil tulang belulang Nabi Sulaiman di bawahnya," ujarnya.

Secara terpisah, Presiden International Crisis Group Gareth Evans mengatakan konflik Palestina dan Israel tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan militer. Untuk mengatasi konflik ini dibutuhkan sebuah pendekatan baru dengan tujuan menciptakan kembali persatuan Palestina dan mendukung pemerintahan koalisi yang dipimpin Fatah dan Hamas.

Pendekatan baru itu pertama-tama dilakukan dengan memulai gencatan senjata seperti yang ditekankan oleh komunitas internasional. "Gencatan senjata merupakan langkah serius

yang harus benar-benar diambil untuk membangun kembali persatuan rakyat Palestina. Langkah itu memang terdengar sulit, tetapi harus segera dirintis karena saat ini rakyat Palestina sudah sangat menderita," katanya di Jakarta, Senin (12/1).

Evans mengatakan keputusan Hamas dan Israel yang bersikukuh meneruskan perang akan sangat merugikan. "Akan semakin banyak anak-anak dan perempuan yang menjadi korban dalam konflik ini. Anak-anak tidak berdosa. Darah mereka tidak boleh digunakan untuk memenuhi kepentingan politik oleh kedua belah pihak," katanya.

Dia menilai Indonesia sudah memainkan diplomasi aktif dalam membantu menyelesaikan masalah Palestina. Antara lain Indonesia sudah memulai pembicaraan dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan berbagai pihak lain dalam konteks mendukung Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional memperjuangkan gencatan senjata. Mantan Menteri Luar Negeri Australia itu mengatakan Indonesia bisa terus memainkan peranannya dengan berpartisipasi menjadi bagian pasukan penjaga perdamaian di sana.

### **Pasukan Cadangan**

Di hari ke-17 agresi militernya kemarin (12/1), Israel mulai mengirimkan pasukan cadangan ke Gaza untuk membantu ribuan pasukan darat yang telah berada di sana. Pengerahan pasukan cadangan ini merupakan sinyal kuat bahwa Negeri Yahudi itu akan mengintensifkan serangannya.

"Israel adalah negara yang bereaksi penuh semangat. Itu adalah sesuatu yang Hamas perlu mengerti dan itu adalah bagaimana kami akan bereaksi di masa depan, jika mereka sangat berani menembakkan satu misil ke Israel," kata Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni.

Pasukan Israel kemarin terus menggencet Gaza meskipun sempat melakukan gencatan senjata tiga jam pada pukul 10.00-13.00 untuk memberi kesempatan masuknya bantuan kemanusiaan bagi warga setempat.

Dari pinggiran Kota Gaza tampak asap hitam muncul dari wilayah timur. Setidaknya enam warga Palestina terbunuh dalam serangan udara yang diluncurkan Israel kemarin. Hingga saat ini korban di pihak Palestina mencapai 900 orang dengan korban luka-luka setidaknya 4.100 orang.

Menurut Juru Bicara Militer Israel, Avital Leibovic, pasukannya semakin dalam memasuki wilayah perkotaan Gaza karena anggota Hamas dipercaya bersembunyi di berbagai tempat, khususnya wilayah-wilayah kota.

Dalam dua atau tiga hari ke depan, para pemimpin Israel akan memutuskan apakah melanjutkan serangan ke fase ketiga, yakni menguasai sebagian besar wilayah Gaza. Itu pula yang menjadi alasan pengerahan ribuan pasukan cadangan. Sembari menunggu keputusan itu, unit pasukan cadangan akan mengambil alih wilayah yang telah "dibersihkan" oleh pasukan reguler.

Untuk memecah pasukan Israel, warga Gaza banyak memasang bom rakitan sendiri dan boneka-boneka pajangan di depan pintu masuk apartemen. Benda-benda itu akan meledak jika pasukan mendekat. Sekitar sembilan roket juga diluncurkan ke wilayah Israel, namun tidak memakan korban.

Campur tangan komunitas internasional yang menginginkan gencatan senjata tak banyak kemajuan. Di Kairo, Agen Berita Timur Tengah (MENA) melaporkan pembicaraan antara Kepala Intelijen Nasional Mesir Omar Sulaiman dengan Duta Hamas berjalan positif, namun tidak ada laporan spesifik lainnya.

Pihak Barat tengah mendiskusikan sistem pengawasan teknis internasional untuk membantu Mesir menghentikan penyelundupan senjata dan pengiriman roket ke Gaza. Namun, Mesir lebih mengkhawatirkan kedaulatannya dan menentang pasukan internasional ditempatkan di perbatasannya.

Pesawat tempur Israel dilaporkan berulang kali menyerang koridor Philadelphi, perbatasan sepanjang 15 kilometer antara Gaza dan Mesir. Dalam fase ketiga nanti, Israel akan menguasai koridor itu dan kota perbatasan Rafah.

Mengenai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai gencatan senjata, Israel tampaknya tetap mengabaikan. "Keputusan Dewan Keamanan tidak memberikan kami banyak waktu senggang. Tampaknya itu memperlihatkan bahwa kami telah mendekati akhir operasi darat dan mengakhiri keseluruhan operasi bersamaan," kata Matan Vilnai, Deputy Menteri Pertahanan Israel. (Jurnal nasional)

## 7. Militer RI-Australia Sepakati Perjanjian Lombok

TNI dan Angkatan Bersenjata Australia menyepakati rumusan pelaksanaan Perjanjian Lombok (*Lombok Treaty*). Kesepakatan tertuang dalam nota pernyataan bersama yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan Panglima Australia Marsekal Allan Grant Houston di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (12/1).

"Salah paham dan salah pengertian yang ada bisa dikurangi dengan kesepakatan ini," kata Djoko usai mendampingi Grant bertemu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di kantor Departemen Pertahanan.

Pokok masalah yang tercantum dalam nota kesepakatan terkait isu terorisme, keamanan maritim, intelijen, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana, serta misi pemeliharaan perdamaian.

Adanya kesepahaman bersama ini membuat latihan kedua Angkatan Bersenjata, serta masing-masing Angkatan Darat, Laut, dan Udara dapat lebih dieratkan lagi. Namun, dia mengakui akan mempertajam skala prioritas latihan bersama karena terbatasnya anggaran pertahanan akibat krisis keuangan global.

"Mudah-mudahan optimalisasi kerja sama yang memberikan manfaat kedua pihak, atas dasar saling memahami dan penuh kesetaraan dapat dicapai," katanya. Dia berharap, perbedaan prosedur tetap dan beberapa isu utama pada kesepakatan, tidak akan menjadi kendala berarti.

Apalagi, kedua pihak setuju terus menyelaraskan perbedaan yang ada untuk dapat ditindaklanjuti para prajurit di lapangan. Djoko mencontohkan, dalam keamanan maritim akan dibentuk komite bersama (*steering committee*). Tujuannya, membahas laut perbatasan, khususnya pelanggaran yang terjadi.

Meski demikian, belum ada rencana pembentukan badan seperti *general border committee* seperti dengan Malaysia yang khusus menangani perbatasan. "Belum diperlukan," kata lulusan Akademi Militer tahun 1975 itu.

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen menambahkan, implementasi awal kesepahaman dapat dilakukan melalui pertukaran perwira dan saling kunjung pejabat angkatan bersenjata kedua negara sebagai ajang saling bertukar pengalaman dan informasi.

Perjanjian Lombok yang ditandatangani kedua pemerintahan pada 13 November 2006 dan mulai berlaku 7 Februari 2008 lalu, menjadi kerangka kerja sama keamanan dua negara. Selain keamanan, Perjanjian Lombok meliputi kerja sama penegakan hukum, keselamatan pembangunan, dan keamanan pencegahan senjata pemusnah massal. Perjanjian ini juga mencakup kerja sama darurat, kerja sama dalam organisasi dunia tentang isu-isu keamanan dan kerja sama antarmasyarakat. (Jurnal Nasional)

## 8. Tenaga Kerja Indonesia yang Tejebak di Palestina Sudah Aman

Umi Saodah, tenaga kerja asal Indonesia yang terjebak di Jalur Gaza, Palestina, dinyatakan sudah aman dan selamat. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI) Jawa Tengah Rachman menyatakan saat ini tenaga kerja yang bekerja sebagai pembantu tersebut sudah berada di tempat penampungan yang berada di Gedung Otorita Palestina. "Dia hidup sehat dan tidak ada masalah," kata Rachman di Semarang, Selasa (13/1).

Umi Saodah adalah warga RT 6 RW 5 Dusun Tlawongan, Desa Karang Tengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang yang menjadi TKW di Palestina sejak delapan tahun lalu. Rachman menyatakan, pihaknya menerima informasi ini dari Direktur Perlindungan dan Badan Hukum TKI yang ada di Kairo.

Rachman menambahkan, sebenarnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo akan menjemput Umi Saodah. Tapi perang di Jalur Gaza masih berkecamuk dan jalur masuk ke wilayah Palestina masih tertutup sehingga penjemputan itu ditunda dulu. "Nanti kalau perang sudah mereda akan segera dijemput dibawa pulang ke Indonesia," ujarnya.

Menurut data yang dimiliki BN2TKI Jawa Tengah, Umi Saodah berangkat ke Palestina delapan tahun lalu. Dia diberangkatkan oleh PT Andro Meda Jakarta. Sebenarnya, anak pasangan Moh Yasmin (58 tahun) dan Katinem (55 tahun) ini bekerja di Yordania sebagai pembantu. Pemberangkatan ini melalui jalur resmi dan dilengkapi dengan dokumen yang jelas. Tapi setelah enam tahun masa kerjanya habis lalu dia pindah ke Palestina. "Kami belum tahu, siapa yang mengajak Umi Saodah ke Palestina," katanya. (Tempo Interaktif)

## **NASIONAL**

### **A. POLITIK**

#### **1. Presiden Akan Beri Pengarahan Soal APBN**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (13/1) siang pukul 14.00, akan memberikan pengarahannya kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu dalam sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta. Dalam acara itu, selain hadir para menteri, juga Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan pejabat lainnya.

Pengarahannya akan disampaikan Presiden Yudhoyono, menurut sumber **Kompas** di Jakarta, Selasa pagi ini, terkait dengan keputusan pemerintah yang kemarin menurunkan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik (TDL), dan lainnya. Masalah lainnya yang akan dibahas, tambah sumber itu, adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009, di antaranya terkait dengan merosotnya jumlah penerimaan APBN 2009 yang diperkirakan sampai 30 persen.

Sementara itu, belanja negara akan tetap jumlahnya, tetapi diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan jaringan pengaman sosial. Akibatnya, defisit anggaran diperkirakan akan membengkak dari target yang direncanakan sebesar Rp 45 triliun atau 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi lebih dari 3 persen.

"Kalau lebih dari 3 persen, itu berarti melanggar UU. Karena itulah, Presiden perlu memberikan pengarahannya," demikian sumber tersebut. (Kompas)

#### **2. Legiun Veteran Desak Amendemen UUD**

Perhimpunan veteran Indonesia mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengubah atau mengamendemen UUD untuk kelima kalinya. Perubahan amendemen ini untuk memastikan sistem presidensial berlangsung pada pemerintahan mendatang.

"Kalau bapak bisa gubah 'Rinduku Padamu', kami berharap sebelum bulan Juni, bapak bisa menciptakan rinduku amendemen UUD ke-5" ujar Ketua Legiun Veteran RI Letjen (Purn) Rais Abin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/1).

Rais Abin menilai, selama ini presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi tidak diberkahi kabinet presidensial. Pemerintahan SBY-JK justru menganut kabinet Parlemen.

"Ini tidak akan seefektif kabinet presidensial," ujarnya.

Dampak lebih lanjut, kata Rais Abin, perencanaan tepat akan semakin jauh, dan sulit mengatur pembangunan berencana.

Menanggapi desakan amendemen UUD tersebut, Presiden Yudhoyono mengemukakan kewenangan perubahan UUD berada di tangan rakyat, yang secara konstitusional berada di pundak Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Meski sepenuhnya berada di tangan MPR, SBY berharap perubahan UUD tidak tepat bila dilakukan setiap tahun. "UUD itu sesuatu yang sangat fundamental. Kalau ada pikiran baru yang menyangkut konstruksi isi, lazimnya dikembalikan kepada yang memberi mandat, yaitu rakyat," sergahnya.

SBY menambahkan, perubahan UUD yang dikembalikan kepada rakyat harus dikaji secara matang. "MPR mempunyai wewenang, tapi lembaga kajian apa pun bisa untuk memberi pendapat," tandasnya. (Kompas)

#### **3. KPU akan Cabut Usulan Perpres**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mencabut usulan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perubahan ke-8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pendukungnya.

Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa anggota KPU sepakat untuk mencabut Perpres. "Sudah diputuskan akan mencabut," katanya.

Usulan pencabutan ini dilatarbelakangi kesanggupan KPU Provinsi yang belum melaksanakan lelang pengadaan perlengkapan pemungutan suara untuk melaksanakan lelang secara tepat waktu.

Sebelumnya, anggota KPU Abdul Aziz setelah rapat kerja teknis anggota serta sekretariat KPU Provinsi se-Indonesia dengan KPU pusat, di Jakarta, pada Senin(12/1) malam, sekretariat KPU Provinsi menyatakan siap melaksanakan lelang sesegera mungkin.

"Kami gembira, teman-teman di daerah provinsi mengaku siap melakukan lelang," katanya.

Dari 33 provinsi, baru sekitar 12 provinsi yang telah memulai proses lelangnya, sementara sisanya belum. Bagi KPU Provinsi yang belum membentuk panitia pengadaan maupun memulai proses lelang diminta untuk segera melaksanakannya.

KPU melaksanakan rapat kerja teknis dengan anggota dan sekretariat untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pelaksanaan lelang. Sejauh ini baru sebagian KPU Provinsi yang telah memulai proses lelangnya.

Menurut Aziz, dengan adanya komitmen untuk melaksanakan lelang tepat waktu ini, katanya, maka perpres yang telah diajukan ke pemerintah dapat saja dicabut. Namun, pencabutan ini masih merupakan wacana dan akan dibahas dalam rapat pleno KPU.

KPU telah mengusulkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perubahan ke-8 Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapannya.

Usulan isi perpres yakni pertama,memperpendek masa pelelangan umum dengan memakai hari libur dengan hari kerja artinya lelang tetap berjalan pada hari libur. Kedua, penunjukan langsung dalam keadaan khusus atau darurat.

Jika KPU Provinsi memulai lelangnya pada minggu kedua Januari ini, maka waktu masih cukup. Artinya, KPU Provinsi diperkirakan dapat mulai mendistribusikan kebutuhan pemilu sesuai target, yakni pada Maret 2008. (Republika)

## **B. EKONOMI :**

### **1. Menhub : "Aneh" Jika Pilot dan Pelaut Tak Punya NPWP**

Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal membenarkan, aneh jika pekerja sektor transportasi seperti pilot dan pelaut yang bekerja di luar negeri, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jusman, ketika menjawab pers usai Sholat Jumat di Jakarta, membenarkan, "itu aneh" dan karena dengan peraturan baru soal itu, justru mereka dibebaskan fiskal jika memiliki NPWP.

Penegasan tersebut disampaikan menanggapi keberatan pekerja sektor transportasi yang berprofesi sebagai pelaut dan pilot yang bekerja di luar negeri memprotes kebijakan pemerintah karena mencabut ketentuan pembebasan fiskal bagi kedua profesi itu.

Koordinator International Transportworkers Federation (ITF) untuk Indonesia, Hanafi Rustandi, mengatakan selama ini kedua profesi itu dibebaskan atas pengenaan fiskal sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No.34/PJ/2001 tanggal 15 Januari 2001.

Peraturan itu menetapkan pengecualian dan kewajiban pembayaran pajak penghasilan orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri atau fiskal terhadap pilot Indonesia yang bekerja di maskapai asing dan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing rute internasional.

"Namun, setelah munculnya Perdirjen Pajak No. 53/PJ/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang tata cara pembayaran dan pengelolaan administrasi pajak penghasilan bagi wajib pajak yang akan bertolak ke luar negeri pada Butir 5 Pasal 14 Bab VI, pengecualian terhadap pelaut dan pilot Indonesia dicabut," katanya.

Oleh karena itu, Jusman menghimbau agar kedua pekerja sektor transportasi tersebut, segera memproses NPWP agar setiap mereka bepergian dan bekerja di luar negeri bebas fiskal.

"Penghasilan ribuan dolar AS, masak dibebani pajak, tidak mau? Apa tidak malu dengan pekerja di dalam negeri yang penghasilannya di bawah Rp5 juta, dengan senang hati bayar pajak," kata sumber-sumber di lingkungan Dephub.

Sumber itu menyayangkan jika Hanafi Rustandi yang juga Ketua Umum Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) itu malah ingin diberi hak yang sama dan berlaku pada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan di luar negeri.

"Apabila TKI diberikan pengecualian pembebasan pembayaran fiskal sebagaimana tertuang dalam Perdirjen No.53 itu, mestinya hal itu juga diberikan kepada pelaut," kata Hanafi. Kalau mereka tak punya NPWP dan harus bayar fiskal sekian juta rupiah, kata sumber itu, apa tidak malu dengan penghasilan mereka yang puluhan bahkan ratusan juta per bulan. (Antara)

## **2. Price cuts: Yudhoyono's generous gift ahead of polls**

President Susilo Bambang Yudhoyono decided Monday to lower fuel and electricity prices before Indonesians go to the polls this year.

Yudhoyono also issued a policy to immediately force public transportation operators to slash fares and allow the public to directly enjoy the impact of a string of fuel price cuts.

Prices for subsidized Premium gasoline and diesel for private motorists will be cut by 10 percent to Rp 4,500 per liter, and by 6.25 percent to Rp 4,500 per liter, respectively, while subsidized kerosene prices remain unchanged at Rp 2,500 per liter. The new fuel price scheme, the third so far since December last year, will take effect on Jan. 15.

Yudhoyono said the policy was aimed at bolstering household consumption to keep the economy robust amid a deepening global economic crisis, "[The policy] will help sustain the people's purchasing power and prevent mass layoffs. These are the utmost outcomes the government wants to achieve," Yudhoyono said after a Cabinet meeting.

Yudhoyono's fuel price cut, the first ever taken by an Indonesian president, is seen by analysts as a short-term populist election gambit. Indonesians will pick legislators in April 9 and a president in July.

Acting Coordinating Minister for the Economy Sri Mulyani Indrawati promised consumers there would not be a fuel shortage ahead of the price cut as a result of losses that gas station owners would bear because of the price discrepancies.

"[Gas stations] will begin purchasing fuel at the new prices [on Monday night], but people will enjoy the new price effectively on Jan. 15," she said. Mulyani was upbeat the cut would bring the January inflation rate to less than 0.53 percent.

Bank Indonesia forecast inflation to be between 5 and 7 percent this year, easing from 11.1 percent last year. The government is struggling to ease inflation, which has become a key requirement for the central bank to slash its benchmark interest rate to help companies gain access to low-cost borrowing for expansion and to hire workers.

Fueled primarily by domestic consumption, Southeast Asia's largest economy expects to grow by between 4.5 and 5.5 percent this year -- the highest in the region. Indonesia's limited dependence on exports is likely to see it go almost unscathed through the global economic slump.

On Monday, Yudhoyono also lowered electricity rates for companies with power consumption of between 201 kilowatts and 30 megawatts, and those of over 31 megawatt.

Mulyani said industrial energy costs were expected to decline by an average of 8 percent, while energy-intensive industries were expected to save 12 to 15 percent on energy costs. The rate cut will affect January billing.

For cuts in transportation fares, Yudhoyono said a policy issued by Transportation Minister Djuhan Syafii Jamal would require intercity and interprovince transportation operators to reduce fares by 10 percent, effective Jan. 15. (The Jakarta Post)

## **C. SOSBUD**

### **1. Tahun 2009, Harga Obat Dijamin Stabil**

Untuk menjamin harga obat stabil, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari akan memberi subsidi sebesar Rp280 miliar. Subsidi tersebut digunakan untuk menutup selisih pembelian harga bahan baku obat dan obat jadi.

"Kami juga akan membeli banyak sekali bahan baku dan obat jadi. Sehingga, stok cukup dan tak boleh ada lagi produsen menaikkan harga obat," kata Menkes saat memberi keterangan pers tentang harga obat di Kantor Departemen Kesehatan Kuningan, Jakarta, kemarin.

Menkes tak mengelak dari fakta, sebagian besar keberadaan obat-obatan di Indonesia masih sangat tergantung pasokan dari luar negeri atau diimpor. Baik dalam bentuk bahan baku maupun obat jadi. Akibatnya, harga obat-obatan di dalam negeri sangat dipengaruhi fluktuasi nilai

tukar rupiah terhadap dolar AS yang sulit diprediksi selama setahun ke depan. "Maka, bila di tengah tahun kurs rupiah terpuruk, harga obat tidak akan terpengaruh," katanya.

Menkes juga akan menurunkan 21 jenis obat generik. "Untuk obat generik bermerek harganya maksimal harus tiga kali harga obat generik biasa," katanya. Sedangkan untuk jenis yang lain, Menkes mengingatkan agar produsen obat tidak boleh sembarangan menaikkan harga. "Untuk obat yang bahan bakunya sudah kami beli, tidak boleh naik," katanya.

Tahun 2009 pemerintah juga akan menjalankan program OGS atau Obat Generik Subsidi. Subsidi diberikan untuk obat generik dan obat generik bermerek. Anggaran berasal dari APBN dengan skema yang akan ditentukan Depkes.

Dijelaskan, program OGS adalah untuk pemberdayaan industri farmasi dalam negeri yang dilakukan pemerintah dengan cara memberikan subsidi dan insentif pasar kepada industri farmasi menengah ke bawah. Tujuan, agar kelak mampu memenuhi kebutuhan obat dalam negeri sekaligus mempersiapkan diri menghadapi krisis global yang akan berlanjut menjadi resesi ekonomi. "Untuk mengontrol penjualan harga obat generik bersubsidi, Depkes akan mengatur dan mengawasi harga penjualannya," kata Menkes. (Jurnal Nasional)

## **2. Program Konseling bagi Narapidana KDRT Disiapkan**

Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Untung Sugiyono mengatakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) telah menyiapkan program konseling bagi narapidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Modul konselingsnya, kata Untung, disiapkan bersama lembaga Mitra Perempuan dan The Ford Foundation.

"Peghuni lembaga pemasyarakatan negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari segi jumlah maupun dari jenis kejahatan. KDRT merupakan salah satu tindakan kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia," kata dia dalam acara peluncuran program konseling pelaku KDRT di Hotel Century, Jakarta, Selasa (13/1).

Untung menjelaskan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT menyatakan setiap perbuatan seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga disebut KDRT. "Ancaman sampai 20 tahun penjara dapat juga berupa denda yang cukup tinggi serta pidana tambahan serta kewajiban mengikuti program konseling di lembaga pemasyarakatan tertentu," jelasnya.

Bila selama ini fokus perhatian pada KDRT ada pada korban, Untung menganggap penting dari sisi pelaku. Tindak pidana KDRT merupakan tindakan yang berulang. Untuk itu upaya penyadaran dan pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan merupakan cara yang efektif dalam mencegah KDRT.

Dirjen Pemsayarakatan telah menyiapkan program layanan konseling 10 sesi. Untuk awalnya wilayah Jabodetabek yang menjadi pilot project. Tercatat ada 47 orang narapidana pelaku KDRT dan tindak pidana tertentu 1 tahun dan tertinggi 2 tahun. Untung menyatakan akan ada penambahan pegawai yang akan dididik menjadi konselor. "Lapas juga akan memakai relawan dari lembaga swadaya masyarakat," kata Untung. (Tempo Interaktif)

## **D. HANKAM :**

### **1. TNI AL Kirim Kapal Perang ke Lebanon**

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Lili Supramono mengemukakan, pengiriman kapal perang TNI AL ke Lebanon yang ditugaskan oleh PBB merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia.

"Kesempatan berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB ini merupakan wujud kepercayaan. PBB mengakui kemampuan Indonesia, khususnya TNI AL dalam melaksanakan operasi di laut serta operasi-operasi bersama dengan negara lain," katanya di Surabaya, Senin (12/1).

Saat memberi pembekalan pada 110 prajurit yang akan ditugaskan ke Lebanon dengan menggunakan KRI Diponegoro-365 itu, Pangarmatim juga mengemukakan bahwa pengiriman ini merupakan kesempatan yang sangat strategis karena untuk pertama kalinya misi perdamaian melibatkan kapal perang TNI AL.

KRI Diponegoro akan bergabung dalam misi perdamaian PBB bersama dengan beberapa kapal perang dari negara-negara Eropa, seperti Jerman, Perancis, Portugal, Belanda, dan Italia.

"Dengan bergabungnya kapal perang Indonesia ini, merupakan kemajuan sangat positif bagi TNI AL serta berdampak cukup besar pada citra *Maritime Task Force* (MTF), karena komposisi kapal-kapal tidak hanya didominasi oleh negara-negara Eropa, tetapi juga melibatkan salah satu negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia," katanya.

Menurut dia, kepercayaan itu menuntut kesiapan prajurit TNI AL khususnya ABK KRI Diponegoro agar dapat bekerja sama dalam suatu gugus tugas dengan angkatan laut negara-negara Eropa yang merupakan anggota NATO.

"Kemampuan gugus tugas ini harus memenuhi standar maupun kriteria yang ditetapkan PBB. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan PBB dalam melaksanakan pengaturan dan pemeriksaan, baik sebelum maupun setelah melaksanakan operasi," katanya.

Pangarmatim meminta, agar para prajurit membekali diri dan meningkatkan kemampuan personel dalam kerja individu ataupun dalam tim, serta menyiapkan berbagai perlengkapan yang akan digunakan dalam misi tersebut. (Kompas)

## **2. TNI Minta Tambah Anggaran**

Tentara Nasional Indonesia meminta tambahan anggaran Rp 460 miliar pada 2009. Menurut Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, tambahan anggaran akan digunakan untuk mendukung operasional TNI.

"Dukungan anggaran operasional ini diperlukan karena pemotongan anggaran pertahanan ditenggarai membahayakan kemampuan menjaga kedaulatan dan keutuhan negara," kata Juwono saat konferensi pers usai rapat pimpinan Dephan-TNI di kantor Departemen Pertahanan, Jakarta.

Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009, anggaran pertahanan dan TNI adalah Rp 33,6 triliun. Jumlah tersebut masih dipotong 10 persen pada 2-3 bulan ke depan.

"Kami terima anggaran tersebut berikut pemotongannya. Namun kita minta pada instansi keuangan negara, Menteri Keuangan mempertimbangkan untuk 2009 ini tolong dibantu kembali sekitar Rp 460 miliar agar tugas minimum operasional 2009 bisa dilaksanakan," kata Juwono.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso membenarkan pernyataan Juwono. TNI memerlukan dukungan nominal untuk operasional. Selama ini, kata Djoko TNI telah menyadari dan menerima keterbatasan dana bagi militer. Namun operasional demi menjalankan tugas pokok nyatanya masih perlu dukungan dana tambahan.

Soal kemungkinan tak dipenuhinya permintaan tersebut, Djoko mengatakan telah memiliki antisipasi. "TNI juga sudah menyiapkan cara bertindak apabila memang tidak ada tambahan biaya operasi," kata Djoko. Yaitu dengan mengevaluasi dan prioritas. "Namun langkah prioritas pengamanan, gerakan dan tindakannya seperti apa itu rahasia". (Tempo Interaktif)

## **E. HUKUM**

### **1. KBRI Singapura Diminta Lacak Hartono**

Kejaksaan Agung meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk melacak Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Hartono Tanoesoedibjo di negara tersebut. Surat permintaan bantuan tersebut disampaikan melalui Departemen Luar Negeri (Deplu).

"Tadi sudah ada konsep surat untuk ke Deplu, untuk menanyakan apa benar dia (Hartono) dirawat di sana. Katanya di Singapura. Kami belum tahu, di rumah sakit apa," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy di Kejaksaan, Jakarta, Senin (12/1). Menurut Marwan, surat tersebut ditandatangani kemarin dan rencananya langsung dikirimkan ke Deplu.

Sebelumnya, pekan lalu, Tim Pembela PT SRD dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Hotma Sitompoel dan Andi Simangunsong mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan, menyatakan Hartono dirawat di Singapura. Marwan

menegaskan, tidak diperlukan dokter independen untuk memastikan kebenaran sakitnya Hartono. "Kita percaya *lah* dengan dokter-dokter yang rumah sakitnya diakui kredibilitasnya."

Kejagung merasa perlu mengecek keberadaan Hartono di Singapura, karena sejak 24 Agustus 2008 lalu imigrasi telah mengeluarkan cecal terhadap dirinya, atas permintaan Kejagung. Cecal tersebut dikeluarkan, menurut Marwan, karena Hartono merupakan saksi terindikasi terlibat dalam kasus Sisminbakum. (Jurnal Nasional)

**F. OLAH RAGA : Tidak Ada**

**G. LINGKUNGAN HIDUP :**

### **1. Bank Inggris Komitmen Beli Karbon Hutan Aceh**

Merrill Lynch International, salah satu bank di Inggris berkomitmen membeli karbon hutan Ulu Masen Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) senilai 10 juta dolar Amerika Serikat.

"Merrill Lynch akan membeli kredit karbon senilai 10 juta dolar AS dengan ketentuan jika sudah memiliki sertifikat kredit karbon," kata Tim Asistensi bidang sistem manajemen informasi Gubernur NAD, Wibisono yang dihubungi dari Banda Aceh, Jumat.

Menurut Wibisono, keinginan Merrill Lynch tersebut baru sebatas tahap komitmen dan mereka mengusulkan untuk direalisasikan dengan kesepakatan. Mereka juga baru akan membayar jika kawasan hutan sudah memiliki sertifikat kredit.

Wibisono menambahkan, perdagangan karbon memiliki beberapa model antara lain mengikuti Protokol Kyoto yang mengatur pengurangan emisi aktifitas industri.

Saat ini yang baru dilakukan berupa pasar sukarela dimana siapa saja bisa membuat komitmen untuk membeli karbon hutan.

Sementara itu Comunication Officer Flora dan Fauna International (FFI) Aceh, Dewa Gumay mengatakan, FFI yang sejak awal menginisiasi kredit karbon hutan Aceh khususnya Ulu Masen memfasilitasi bantuan teknis misalnya menyediakan konsultasi untuk Pemerintah Aceh.

Perdagangan karbon sendiri, menurut Dewa Gumay, hingga kini belum ada mekanisme jelas yang mengaturnya seperti bagaimana penyaluran dana oleh Merrill Lynch ke Aceh, tambahnya.

Dewa Gumay mengatakan, komitmen tersebut akan dimulai di wilayah Ulu Masen yang menjadi pilot proyek. Dipastikan tidak keseluruhan luas hutan Ulu Masen yang mencapai 740 ribu hektare menjadi kawasan perdagangan karbon.

"Kita belum tahu wilayah mana yang layak untuk perdagangan karbon karena *assessment* juga belum dilakukan," tambahnya.

Hutan Ulu Masen, sebagai kawasan ekosistem yang belum memiliki status baik melalui Peraturan Menteri maupun peraturan lainnya dipilih karena memiliki tantangan bagaimana melindungi wilayah hutan yang tidak berstatus hukum.

Berdasarkan proyeksi citra lansat Badan Planologi menunjukkan, dalam kurun waktu sembilan tahun, hutan Aceh mengalami pengurangan luas sebesar 500 ribu hektare atau setara 13,84 persen dari total luas 3.611.953 hektare.

Pengurangan luas ini terjadi sejak tahun 1994 hingga 2003, sementara Greenomics memperkirakan deforestasi dan degradasi di kawasan hutan Aceh selama 2002-2004 mencapai 200 ribu Ha, 60 persen terjadi di kawasan konservasi dan hutan lindung.

Penurunan luas kawasan hutan, sebagian besar disebabkan konversi hutan untuk kebutuhan pemukiman, lahan pertanian, perkebunan, dan industri. Penyebab lainnya adalah aktivitas *illegal logging*, dan kebakaran hutan.

Karena kawasan hutan Aceh masih dinilai salah satu yang terbesar di Indonesia maka diwacanakan perdagangan karbon terhadap hutan-hutan tersebut untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Pada dasarnya, perdagangan karbon berupa kesepakatan negara pemilik hutan dengan negara lain agar tetap menjaga hutannya sehingga menjadi paru-paru dunia. (Antara)

**III. ARTIKEL :**

### **1. Tantangan Baru, Problem Lama oleh Bambang Soesatyo**

Konsistensi. Itulah problem lama para menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu. Kepada masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji bahwa pemerintah akan bekerja all outmemperkecil dampak krisis dan menguatkan kinerja sektor riil untuk mencegah hadirnya penganggur baru.

Janji presiden itu bisa diwujudkan jika para menteri konsisten pada kebijakan. Dampak krisis sekarang tak bisa hanya ditangkal dengan rangkaian kebijakan yang defensif, melainkan juga mengatasi inti persoalan, yaitu memperkuat pasar dalam negeri serta menumbuhkan permintaan.

Untuk itu sudah dirumuskan langkah-langkah membatasi masuknya produk impor dan perlindungan pasar dalam negeri. Pemerintah juga bertekad menjaga konsumsi rumah tangga. Pada aspek peningkatan atau penguatan konsumsi dalam negeri (pemerintah dan rumah tangga), para menteri bidang ekonomi sempat terlihat ragu-ragu karena khawatir dengan rusaknya keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bisa dimaklumi, sebab untuk menguatkan konsumsi dalam negeri, dibutuhkan keberanian mengimplementasikan politik subsidi. Padahal, jika permintaan dalam negeri tidak distimulasi, kita tidak punya lagi motor pertumbuhan yang bisa diandalkan. Mengharapkan ekspor sebagai pendorong pertumbuhan jelas tidak realistis.

Sebab, permintaan di kawasan tujuan ekspor kita, Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS), sedang menurun tajam. Juga tidak realistis jika mengharapkan investasi baru. Pemodal dalam negeri enggan berinvestasi karena suku bunga yang tinggi, rendahnya daya beli konsumen dalam negeri, dan suasana yang serbatidak kondusif.

Berharap pada investasi asing pun ibarat "Menunggu Godot". Para pemodal asing "dipanggil" pulang untuk berkonsolidasi di dalam negeri masing-masing. Akibat krisis finansial, bank-bank di negara mereka pun belum berani membiayai investasi di negeri lain. Karena itu orientasi ke dalam negeri menjadi langkah paling bijaksana dan realistis. Pasar kita sangat besar, mencakup 230 juta warga yang masing-masing memiliki kebutuhan konsumtif.

Hanya saja, masalahnya adalah daya beli warga kita lemah. Maka penyebab lemahnya daya beli itulah yang harus ditangani. Berbagai kalangan sepakat bahwa kebijakan beruntun pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai penyebab lemahnya daya beli masyarakat.

Maka, ketika harga minyak di pasar internasional mulai turun dalam skala tajam akhirnya pemerintah didesak untuk menurunkan harga jual BBM bersubsidi. Gayung bersambut, pemerintah pun merespons permintaan dunia usaha dengan memberikan insentif pajak. Sayang, sementara ini jumlahnya hanya Rp12,5 triliun.

Kombinasi dua stimulus ini belum terasa efektivitasnya. Pertama, pemerintah tidak "memaksa" para operator angkutan menurunkan tarif, akibatnya harga barang belum bisa turun karena biaya distribusi tidak bisa dikoreksi. Karena tetap tingginya harga barang, target menambah daya konsumsi rumah tangga dari kebijakan penurunan harga BBM tidak akan tercapai.

Kedua, industri penikmat insentif pajak dibatasi dengan tiga syarat: harus bisa menyerap tenaga kerja, menyumbang pajak, dan menumbuhkan ekspor. Pada hari terakhir 2008, Presiden mengembuskan optimisme. Pertumbuhan ekonomi 2009 ditargetkan di atas 4,5%. Kemudian akan diimplementasikan tujuh langkah kebijakan untuk memperkecil potensi pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, kinerja sektor riil akan ditingkatkan dengan sejumlah kebijakan fiskal.

Selama ini kita meremehkan potensi pasar dalam negeri. Kita juga membiarkan sektor riil yang nyaris mati suri. Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kinerja sektor riil, tetapi rangkaian kebijakan itu tak pernah konsisten diimplementasikan. Kini, ketika kita tak punya pilihan untuk bisa lolos dari sergapan krisis, kita disadarkan tentang besar potensi pasar dalam negeri dan pentingnya sektor riil yang kompetitif.

Kita harus menekan barang impor, utamanya kategori tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, elektronik serta makanan/ minuman yang saat ini sudah diproduksi di dalam negeri. Maka, stimulus itu harus dilandasi strategi yang komprehensif. Harus mencakup strategi meningkatkan produktivitas sektor riil agar produsen lokal menjadi pemain utama (pemasok) aneka kebutuhan konsumen dalam negeri, dengan kualitas dan harga produk yang kompetitif.

Bersamaan dengan itu, tingkatkan efektivitas pencegahan penyelundupan. Dengan tujuan besar seperti itu, kalau perlu nilai stimulus pajak dibesarkan sampai Rp50-an triliun. Nilai stimulus yang besar memungkinkan seluruh subsektor produksi serentak bergerak, memproduksi barang yang kompetitif guna memperkecil penetrasi produk impor.

Untuk mencapainya dengan mulus, pemerintah harus menghilangkan dulu persyaratan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menaikkan setoran pajak penghasilan, dan mendorong ekspor bagi industri yang akan mendapatkan insentif pajak. Memberlakukan persyaratan itu jelas melupakan tujuan besar saat ini, yakni penguatan pasar dalam negeri. Penguatan pasar dalam negeri mensyaratkan peningkatan produksi aneka barang di dalam negeri. Idealnya industri penikmat insentif tidak dibatasi.

Pokoknya, berikan saja insentif pajak kepada produsen yang mampu memproduksi aneka barang yang kompetitif dengan produk impor, sehingga di kemudian hari konsumen dalam negeri tidak lagi bergantung pada produk impor. Itu baru insentif untuk dunia usaha. Adapun untuk persoalan utama, rendahnya daya beli rakyat, harus ada stimulus yang bisa menguatkan daya beli.

Mengapa konsumen/masyarakat tidak mendapatkan insentif yang sama, misalnya dengan menurunkan persentase PPh atau PPN. Bahkan, kalau memungkinkan, harga bensin dan solar diturunkan lagi hingga ke level Rp3.000-an per liter. Kadin juga berharap BI Rate bisa segera diturunkan. Faktor rendahnya inflasi dan lemahnya konsumsi menjadi momentum yang relevan untuk penurunan BI Rate.

Penurunan BI Rate akan melengkapi stimulus fiskal. Selain faktor melemahnya tekanan inflasi, ada beberapa alasan lain yang mengharuskan koreksi terhadap suku bunga. Penurunan suku bunga menjadi tren global sebagai upaya mereduksi dampak krisis finansial. Para ekonom mendesak semua negara melakukan aksi bersama, termasuk di dalamnya adalah langkah menurunkan suku bunga.

Mengawali 2009, kita mendorong BI agar menurunkan BI Rate lebih jauh lagi. Jika sebelumnya pemerintah telah memberikan "kado akhir tahun" bagi dunia usaha dan rakyat dengan penurunan BI Rate ke level 8,75%, tak ada salah "kado" itu kembali diberikan dengan penurunan ke level 8,5%.

Kalau BI Rate turun lagi, Kadin yakin Indonesia bisa memperkecil dampak krisis. Dengan suku bunga yang kini rata-rata 17%, posisi BI Rate sekarang belum mampu mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit modal kerja dan investasi. (Koran Sindo)

## **2. Korupsi KPK Bidik Penyelewengan Pelayanan Publik oleh Antasari Azhar**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindak tegas para pelaku penyelewengan di sektor pelayanan publik terhitung mulai tahun 2009 ini. Tahun 2008 sudah cukup merupakan tahun edukasi dan sosialisasi terhadap tindakan yang telah diambil KPK dalam menindak penyelewengan pada sektor pelayanan publik.

"Sebelum mengambil tindakan atas sebuah penyelewengan sektor pelayanan publik yang terindikasi korupsi, pihak KPK terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan edukasi. Karenanya, KPK belum mengambil tindakan tegas. Tapi, dalam tahun 2009 ini KPK secara penuh akan mengambil tindakan tegas terhadap penyelewengan pelayanan publik," kata Ketua KPK Antasari Azhar, dalam diskusi Agenda 23 Wacana dari Slipi bertajuk "Pemberantasan Korupsi: Penegakan Hukum atau Pencitraan?" yang diselenggarakan DPP Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (12/1).

Dalam diskusi yang dimoderatori Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, selain Antasari hadir juga pembicara lainnya seperti Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta, Jampidsus Marwan Effendy, mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, dan sejumlah pengurus DPP Partai Golkar; di antaranya Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono, Ketua Harian I Bappilu Pusat Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu, dan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Fatommy Asaari.

Antasari menjelaskan, sesuai dengan fungsi dan tugas dari KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk di sektor pelayanan publik, KPK sudah menginventarisasi 14 departemen yang rawan terhadap penyelewengan pelayanan publik. "Berbagai temuan penyelewengan pelayanan publik dalam tahun 2008 di 14 departemen itu sudah kita sampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing untuk ditindaklanjuti. Pada 2009 ini KPK yang menindaknya," ujar Antasari Azhar.

Ia juga menyebutkan lambatnya pengesahan APBN dan APBD sebagai sebuah peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Keterlambatan pengesahan anggaran ini terjadi hampir di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. "Akibatnya, pada akhir tahun, tepatnya pada

bulan Desember, bermunculan dokumen palsu atas berbagai proyek APBN dan APBD," kata Antasari Azhar.

Untuk itu, selaku Ketua KPK, Antasari mengusulkan agar pengesahan APBD dan APBN dapat dilakukan pada bulan Oktober sebelum jatuh tempo tahun anggaran, agar pelaksanaan proyek pemerintah dapat diselenggarakan sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan.

Dalam kesempatan itu, Antasari dengan tegas membantah tuduhan bahwa lembaganya melakukan tebang pilih atas pemberantasan korupsi. Ia mengatakan lembaganya tetap bertindak profesional dan proporsional. "Yang jelas, kita tetap menegakkan hukum dengan profesional dan proporsional," ujarnya. Menurut Antasari, saat ini masyarakat terjebak pada istilah "tebang pilih". Padahal, lanjut dia, istilah ini tidak terdapat dalam kamus hukum.

"Untuk persoalan kasus, kami berpegang teguh pada pembuktian, karena kami tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kasus," katanya.

Sebaliknya, Andi Mattalatta malah menganggap wajar KPK melakukan tebang pilih. Menurut Andi, undang-undang memang menyuruh KPK untuk melakukan prioritas menyelesaikan kasus yang bernominal Rp 1 miliar. "Jadi, wajar kalau KPK harus memilih. Yang dipilih perkara besar, besar baik dari segi nominal maupun orang pelakunya besar. Tapi, bagaimanapun, yang wajar itu, tetap menentukan prioritas dengan alasan-alasan objektif," kata Andi yang juga Ketua DPP Partai Golkar Korbid Pemenangan Pemilu ini.

Ia mengatakan, ada alasan-alasan objektif sehingga bisa dilakukan tebang pilih. Pertama, nominal yang besar didulukan dari yang kecil. Kedua, teknis pengungkapannya yang mudah didulukan dari yang sulit. Ketiga, kecenderungan keinginan rakyat. "Misalnya, saat ini dunia sedang mencemaskan global warming. Kalau memang ada kasus illegal logging, mengapa tidak diprioritaskan," kata Andi Mattalatta. "Jadi, menurut saya, memilih-memilih sepanjang objektif, tidak masalah. Yang tidak benar adalah tebang pilih karena balas dendam. Kedua, ada alasan politik," ujarnya.

Andi juga mendefinisikan korupsi sebagai spesies perilaku menyimpang dari manusia. "Motifnya hanya satu, ingin mendapatkan sesuatu tanpa berkerlingat," ujarnya. Terhadap orang yang tidak melakukan korupsi, Andi Mattalatta membuat stigma ini hanya soal kesempatan yang belum terbuka. "Orang yang tidak melakukan korupsi belum tentu yang bersangkutan jujur. Bisa jadi kesempatannya belum ada," kata dia.

Untuk itu, ia menyarankan antisipasi terhadap perilaku korupsi sebagaimana yang didefinisikan dalam 30 pasal dari UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah memperbaiki tabiat dengan cara memperbaiki akhlak dan menutup kesempatan korupsi melalui regulasi birokrasi, penguatan institusi serta yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesejahteraan penegak hukum.

Sementara itu, Taufiequrrachman Ruki menilai, korupsi terjadi bukan hanya karena individu yang buruk. Korupsi lebih banyak disebabkan karena jeleknya sistem dan lemahnya sistem. "Korupsi tidak hanya karena bad people tapi bad system dan weak system," katanya.

Ruki mencontohkan pada kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mantan pimpinan KPU, seperti Nazaruddin Syamsuddin dan Mulyana W Kusumah adalah orang yang baik. Namun, lanjut Ruki, karena sistem di KPU lemah, mereka terjebak. "Mereka terkena kasus korupsi juga," ujarnya.

Ruki menjelaskan, selama memimpin KPK, ia selalu mendahulukan pasal-pasal terkait dengan kerugian negara. Menurut dia, korupsi terkait pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara adalah yang paling mudah diusut. "Kasus itu tidak perlu susah-susah disidik, diaudit saja kena," ujarnya. (Suara Karya)

**IV. LAIN-LAIN : T i d a k**  
**Ada**  
**V. EDITORIAL :**

#### **1. Stopping financial predators**

We highly welcome last week's quick move by the Indonesian Stock Exchange (IDX) and capital market watchdog (Bapepam) to suspend Sarijaya Permana Sekuritas securities trading activities and freeze its assets over alleged financial fraud by the company's owner Herman Ramli.

The firm manner in which the capital market regulators suspended Sarijaya's trading operations despite its position as one of the largest securities companies with over 8,700 clients will help maintain confidence in the market.

Critics may argue that the firm and transparent action could roil the market and undermine investor confidence in the IDX. But quietly settling the alleged fraud, even if the culprit could return the Rp 245 billion (US\$22.5 million) in investors' money he allegedly embezzled, would only preserve a false confidence.

But having said the above, fire prevention is still much better than fire fighting. The Sarijaya debacle, uncovered only a few weeks after the disclosure of fraud at securities house PT Antaboga Delta Sekuritas involving around Rp 1.4 trillion in investors' money, should therefore serve as an alarm to the IDX management and regulators that improvement in the oversight of the market and its players is urgently needed.

Because the majority of Sarijaya's clients are retail investors and the amount of the misused funds was quite large by local standards, we suspect that embezzlement had taken place for months.

The question then is how was Ramli able to steal the investors' money for so long without being detected by the IDX management and Bapepam? Yet more flabbergasting was the statement by Sarijaya's board of directors that they knew nothing about the fraud, putting the blame entirely on Herman, the sole owner of Sarijaya.

The fraud at both Sarijaya and Antaboga show that regulators urgently need to improve the legal framework of investor-protection by casting a broad enforcement net to detect and prevent accounting and financial fraud between intermediaries and their clients.

The supervisory system can be considered effective if it is able to protect investors, ensure that markets are fair, efficient and transparent and that systemic risks are reduced.

To achieve this objective, regulators and supervisors should have broad and easy access to time-sensitive data necessary for surveillance and have adequate resources for inspection, surveillance and investigation.

We are glad to hear Bapepam is putting 49 securities houses under special surveillance and Bapepam is finalizing amendments to the capital market law which will give it more power for law enforcement through broader authority for investigations and prosecution of business frauds.

However, an effective supervisory system should start with an equally good mechanism to select the persons qualified to become the controlling owners and directors of securities houses. In terms of technical competence and integrity, the requirements to qualify for controlling owners and directors of securities houses should be as tough as those imposed on banks because both are institutions of trust with fiduciary responsibilities. (The Jakarta Post)

## **2. Golput Administratif yang Mengkhawatirkan**

Golongan putih (golput) selalu menjadi fenomena menjelang pemilihan umum (pemilu). Ia dibicarakan, disudutkan, dan dihambat, tapi banyak juga yang mendukung. Tidak terkecuali pada Pemilu Legislatif 2009 yang bakal digelar kurang dari tiga bulan lagi. Lebih-lebih, ketika golput dianjurkan tokoh politik sekaliber Gus Dur. Maka, bermacam cara pun digunakan untuk melawan anjuran itu. Dari mulai mengampunayakan bahwa golput tidak bertanggung jawab hingga meminta ulama mengeluarkan fatwa haram untuk golput.

Namun, itu baru upaya menghambat perilaku golput untuk satu jenis, yakni mereka yang memutuskan golput karena pilihan politik. Untuk kategori golput yang satunya lagi, yang justru lebih besar potensinya, belum banyak usaha dilakukan untuk meminimalkannya.

Itulah golput yang terjadi karena faktor administratif. Golput administratif adalah warga negara yang sebenarnya sangat ingin menggunakan hak pilih, tapi terganjal oleh ketidakcermatan administrasi.

Ada dua hal yang memicu munculnya golput administratif ini. Kedua-duanya terjadi karena buruknya administrasi dari negara. Yaitu mereka menjadi golput karena tidak terdaftar dan terpaksa golput karena tidak mengerti cara memberikan tanda pada pilihan partai.

Jumlah mereka diperkirakan sangat besar. Survei Indo Barometer menunjukkan indikasi itu. Dari 1.200 responden di 33 provinsi di seluruh Indonesia yang memiliki hak pilih menunjukkan baru 67,2% yang sudah terdaftar. Sebanyak 18,3% menjawab tidak terdaftar, sisanya 14,5% tidak tahu.

Untuk kategori golput administratif karena ketidaktahuan soal cara menandai partai, jumlahnya malah mencengangkan, yakni 60,8%. Itu berarti, jika pemilih berjumlah 170 juta orang, potensi suara tidak sah bisa mencapai 102 juta orang. Sebuah angka yang lebih dari cukup untuk menggerogoti legitimasi hasil pemilu.

Anehnya, kondisi tersebut tidak diantisipasi secara cepat oleh negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) malah lebih banyak disibukkan menagih dana sosialisasi pemilu bagi pemilih, bukan berupaya keras mencari solusi yang efektif untuk menyosialisasikan tata cara memilih.

Padahal, Pemilu Legislatif 2009 kurang dari tiga bulan. Waktu yang amat pendek untuk hajatan besar yang melibatkan lebih dari 100 juta rakyat, dengan banyak persoalan yang masih menumpuk.

Dengan kenyataan seperti itu, kita layak khawatir mutu demokrasi akan menjadi rendah. Kalau upaya yang bersifat segera dan cermat untuk menangani golput administratif itu tidak dilakukan, berarti negara sedang mengabaikan hak jutaan rakyat yang memang berniat untuk menggunakan hak pilih. Itu sama saja dengan mengampuni demokrasi, karena basis dari demokrasi adalah suara rakyat.

Sebaliknya, tidak perlu mengkhawatirkan secara berlebihan jenis golput karena kesadaran politik. Sebab, di samping langkah itu adalah hak demokrasi, jumlah mereka pun tidak signifikan.

Justru golput administratif, akibat buruknya negara mengurus administrasi pelaksanaan pemilu, yang harus dicegah. Itu kalau negara sungguh-sungguh ingin menegakkan demokrasi. (Media Indonesia)

**Jakarta, 13 Januari 2009**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**  
**Deplu**